

KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): BAGAIMANA PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI

Reny Andriyanty^{1,*}, Widyastutik^{2,3}

¹ Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor 16680, Indonesia

² Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor 16680, Indonesia

³ InterCAFE, LRI PSEK, IPB University, Bogor 16680, Indonesia

*Email: andriyanty.reny@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dua tujuan utama. Salah satu tujuan utama adalah memberikan *multiplier effect* ekonomi yang tinggi sehingga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kesejahteraan masyarakat yang terdampak adalah petani. Artikel ini bertujuan menganalisis keterhubungan antara program MBG terhadap kesejahteraan petani Indonesia yang diproksi melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif yang dikombinasikan dengan metode studi literatur. Analisis kuantitatif menggunakan data sekunder yaitu data nilai tukar petani dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2025. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan kebijakan MBG memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan petani dan nilai hubungan kuat yaitu 58,7 %. Kebijakan MBG akan meningkatkan permintaan bahan pangan sehingga mendorong permintaan tambahan terhadap produk pertanian yang menjadi bagian dari program, maka harga produk petani bisa naik, meningkatkan pendapatan mereka. Secara tidak langsung nutrisi yang lebih baik bagi petani dan keluarganya meningkatkan kesehatan dan energi kerja, yang berpotensi meningkatkan produktivitas kerja dan hasil pertanian. Jika produksi meningkat maka NTP bisa naik karena pendapatan petani meningkat. Rekomendasi penelitian ini adalah kebijakan MBG harus fokus pada pengembangan rantai pasok pertanian lokal yang melibatkan petani, peternak, nelayan dan usaha mikro dan kecil di setiap daerah.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP)

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Policy (Makan Bergizi Gratis) has two main objectives. One of the main objectives is to provide a high economic multiplier effect to improve community welfare. One of the communities affected by this program is farmers. This paper aims to analyze the relationship between the MBG program and the welfare of Indonesian farmers, as proxy by the Farmer's Term of Trade Index (NTP). The research method was quantitative research combined with a literature review method. Quantitative analysis used secondary data, specifically the Farmer's Term of Trade Index data from January 2023 to June 2025. The data analysis method applied Spearman's correlation analysis. The research findings showed that after the implementation of the MBG policy, it has a positive effect on farmers' welfare and a strong correlation value of 58.7 %. The MBG policy will increase demand for food products, thereby driving additional demand for agricultural products included in the program, potentially raising farmers' product prices and increasing their income. Indirectly, improved nutrition for farmers and their families enhances health and work energy, which could boost work productivity and agricultural output. If production increases, the NTP could rise as farmer's income grows. The research recommendation is that the MBG policy should focus on developing local agricultural supply chains involving farmers, livestock breeders, fishermen, and micro and small businesses in each region.

Keywords: Free Nutritious Meals Policy, farmer welfare, Term of Trade (NTP)

PERNYATAAN KUNCI

- Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program makan bergizi gratis dengan target 92,8 juta penerima manfaat yang terdiri atas 19,9 juta bayi berusia di bawah lima tahun, 65,6 juta anak sekolah dan 7,3 juta ibu hamil dan menyusui.
- Selain penerima manfaat langsung, tujuan khusus bidang ekonomi adalah pemanfaatan pangan lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani/peternak/nelayan/usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.
- Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hubungan antara kebijakan program MBG terhadap kesejahteraan petani di Indonesia.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi terhadap penerapan Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, adalah perlunya kajian secara terpadu dan pengaturan kembali agar kebijakan MBG yang terkait rantai pasok komoditi pertanian dapat melibatkan petani/nelayan/peternak lokal secara langsung dan memudahkan persyaratan bagi petani skala kecil dalam kebijakan program MBG. Rekomendasi kebijakan lainnya adalah adalah perlunya kegiatan monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

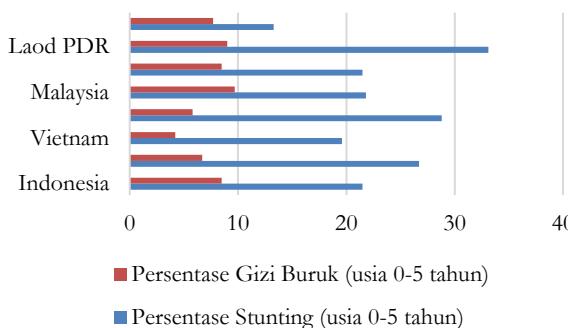
Kebijakan pemberian makan gratis bagi anak-anak adalah program yang banyak diaplikasikan di dunia. Salah satu *lesson learned* pemberian makan gratis di dunia adalah oleh Pemerintah Belanda. Kebijakan ini diinisiasi pada tahun 1900 dimana pemerintah Belanda mengizinkan pemerintah daerah untuk memberi makan dan pakaian gratis kepada anak-anak yang kekurangan sumberdaya. Kebijakan ini juga diimplementasikan oleh Inggris (tahun 1906), Amerika Serikat (tahun 1933), Jerman (tahun 1946), Brasil (tahun 1946), India (tahun 2001), Afrika Selatan (tahun 1994), dan Cina (tahun 2011). Program pemberian makanan sehat di sekolah dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan. Program ini dapat berdampak pada berbagai

sektor pembangunan manusia, pertanian, gender, dan pendapatan (Bundy *et al.* 2024). Penelitian yang dilakukan pada anak-anak sekolah di Korea Selatan dilakukan pada dua kondisi. Kondisi saat kebijakan makan gratis di sekolah dihapus dan kondisi saat kebijakan tersebut diterapkan kembali. Saat kebijakan dicabut, ditemukan efek penurunan berat badan murid perempuan sehingga mengalami kekurangan berat badan. Pasca penerapan kembali kebijakan ini, terjadi penurunan berat badan murid yang kelebihan berat badan secara rata-rata 2,1 % dan membuat murid mencapai berat badan yang lebih sehat dan menekan jumlah murid yang menangis tanpa alasan di sekolah. Penerapan kebijakan makan gratis di Korea Selatan terbukti meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan murid (Bethmann dan Cho 2022). Program nasional makan dan program sarapan di sekolah yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat adalah menyediakan makanan gratis dan berbiaya rendah bagi puluhan juta anak setiap hari. Analisis efek kebijakan tersebut dilakukan terhadap siswa di sekolah menengah New York tanpa memperhatikan pendapatan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi dalam program makan siang sekolah meningkatkan prestasi akademik baik bagi siswa miskin maupun non-miskin; tambahan satu kali makan siang setiap dua minggu meningkatkan skor ujian sekitar 0,08 standar deviasi dalam matematika dan 0,07 standar deviasi dalam Bahasa dan Sastra Inggris.

Dampak lainnya adalah tidak ada efek signifikan terhadap peningkatan kemungkinan obesitas bagi murid penerima program ini dan justru terjadi peningkatan berat badan pada kelompok murid miskin (Schwartz dan Rothbart 2019). Analisis senada dilakukan terhadap kebijakan makan gratis di sekolah yang diterapkan pada murid sekolah di California. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akses siswa terhadap makanan sehat meningkat dengan mereduksi hambatan finansial dan sosial. Penelitian ini menjadi bukti empiris dalam penerapan kebijakan serupa dan dampaknya pada masyarakat (Zuercher *et al.* 2024).

Kawasan Asia Tenggara memiliki 63,4 juta orang yang mengalami kekurangan gizi dan 24,1 juta adalah penduduk Indonesia. Kendala yang dihadapi Indonesia adalah *stunting*, gizi buruk, berat badan kurang, kurus, kelebihan berat badan tinggi dikalangan anak-anak dan remaja (Ludher

dan Nasution 2024). Data detail tertera pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Prevalensi Gizi Buruk pada Anak di ASEAN

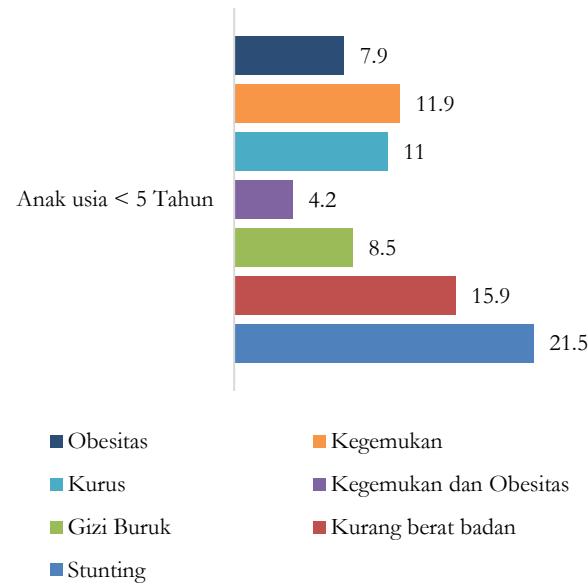
Sumber: ASEAN Secretariat, UNICEF, WFP (2021)

Beberapa studi juga membuktikan bahwa dengan program makan bergizi di sekolah dapat meningkatkan kehadiran dan partisipasi siswa di sekolah, mengurangi malnutrisi dan *stunting*, dan membantu mengendalikan angka obesitas dan diabetes. Kebijakan ini diperkuat dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang bertugas memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia melalui program makan bergizi gratis (MBG). Program ini bertujuan mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia emas akan tercapai melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal (Wicaksana dan Wigati 2024). Studi yang menganalisis hubungan antara program ini dengan kesejahteraan petani belum banyak dieksplorasi. Pada studi ini, kesejahteraan petani diproksi melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Pendapatan rumah tangga petani terdiri atas pendapatan usaha tani dan pendapatan luar usaha tani. Porsi pendapatan luar usaha tani semakin meningkat seiring dengan semakin menyempitnya lahan usaha tani dan semakin baiknya koneksi desa-kota. Mekanisme transmisi hubungan antara MBG dengan kesejahteraan petani yang diproksi melalui NTP adalah melalui tiga mekanisme:

1. Program Bergizi Gratis diprediksi menciptakan permintaan tambahan terhadap produk pertanian tertentu (misalnya sayuran, buah, susu, telur) yang menjadi bagian dari program, maka harga produk petani bisa naik, meningkatkan pendapatan petani dan NTP.
2. Petani dan keluarganya adalah penerima Program MBG sehingga akan memperoleh alokasi MBG. Maka biaya petani untuk membeli makanan bergizi bisa berkurang karena sudah disediakan gratis, sehingga pendapatan yang biasanya untuk konsumsi bisa dialihkan untuk kebutuhan lain atau investasi produksi. Dengan demikian, tekanan biaya hidup dapat menurun, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan daya beli keluarga petani.
3. Nutrisi yang lebih baik bagi petani dan keluarganya bisa meningkatkan kesehatan dan energi kerja, yang berpotensi meningkatkan produktivitas kerja dan hasil pertanian. Jika produksi meningkat tanpa kenaikan biaya produksi yang proporsional, maka NTP bisa naik karena pendapatan petani meningkat.

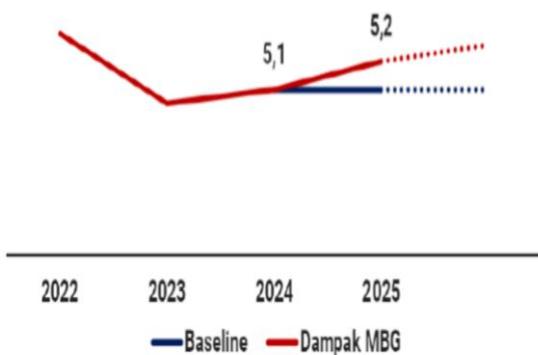
SITUASI TERKINI

Data kondisi gizi anak Indonesia berusia di bawah lima tahun di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini. Mayoritas karena *stunting* mencapai 21,5%.



Gambar 2. Data gizi buruk di Indonesia 2024
Sumber: Ludher dan Nasution (2024)

Pemerintah mengalokasikan 71 triliun rupiah bagi program MBG. Program ini diasumsikan mampu menyerap 0,82 juta tenaga kerja dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,10 % pada tahun 2025 (Gambar 3).



Gambar 3. Grafik proyeksi dampak program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
Sumber: Wicaksana dan Wigati (2024)

Program MBG memiliki target 92,8 juta penerima manfaat yang terdiri atas 19,9 juta bayi berusia di bawah lima tahun, 65,6 juta anak sekolah dan 7,3 juta ibu hamil dan menyusui. Program ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan mendukung kontribusi sistem pangan lokal dan penguatan sektor agribisnis. Program ini juga mengembangkan model rantai pasok lokal yang memperkuat ekonomi pedesaan dan mendukung pertanian skala kecil untuk mampu menangkap peluang pengadaan dan logistik penyediaan makanan (UNICEF 2025). INDEF menjelaskan alokasi belanja pemerintah untuk program MBG mampu mendorong pertumbuhan PDB 14,61 triliun rupiah pada harga dasar 2025, mendorong penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19 % dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39 % serta mampu meningkatkan rerata tiga tenaga kerja pada UMKM yang terlibat program ini. Jika, program ini menggunakan

sumber daya lokal, maka MBG akan mengurangi impor sehingga biaya distribusi rendah dan meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM mitra (INDEF 2024). Aspek lain yang diharapkan dari program MBG adalah total kebutuhan bahan pangan yang dipasok petani, peternak, nelayan, usaha mikro dan kecil mencapai 14,6 ton/tahun. Mampu menciptakan 38 sampai 61 tenaga kerja langsung per desa dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, usaha mikro dan kecil dengan meningkatkan pendapatannya sebesar 1,5 sampai 2,0 kali UMR (Hendrawan 2025).

Bukti empiris yang menjelaskan dampak positif program makan gratis bagi murid sekolah di banyak negara, namun belum banyak analisis yang mengkaji keterhubungan antara kebijakan program MBG terhadap kesejahteraan petani secara umum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, paper ini ditulis dengan tujuan menganalisis keterhubungan antara program MBG terhadap kesejahteraan petani Indonesia yang diproksi melalui nilai tukar petani data bulanan dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2025.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan dikombinasikan dengan studi literatur. Analisis kuantitatif menggunakan jenis data sekunder yang terdiri atas data kebijakan MBG dan data bulanan NTP. Data kebijakan MBG diproksi sebagai variabel dummy. Dummy 1 = berlakunya MBG mulai bulan Januari 2025 sampai Juni tahun 2025. Dummy 0 = sebelum berlaku MBG yaitu bulan Januari 2023 sampai Juni 2025.

Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian

No.	Variabel	Indikator	Jangka waktu	Sumber data
1	Kebijakan MBG	Dummy variabel 1=Penerapan kebijakan MBG; 0=Tidak Ada penerapan kebijakan MBG	Januari 2023 s.d. Juni 2025	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional
2	NTP	Rasio indeks antara harga yang diterima petani dengan harga dibayar petani.	Januari 2023 s.d. Juni 2025	BPS RI

Studi literatur dilakukan mengingat kebijakan MBG di Indonesia baru berjalan mulai bulan Januari 2025. Sehingga rekomendasi kebijakan yang diajukan dalam penelitian ini diperkuat dari hasil rekomendasi kebijakan sejenis

di negara lain yang bersumber dari berbagai literatur.

Data sekunder dianalisis dengan teknik analisis korelasi Spearman. Nilai positif koefisien korelasi menunjukkan kecenderungan satu variabel untuk naik atau turun secara bersama

dengan variabel lainnya. Nilai koefisien korelasi mendekati nol menunjukkan hubungan yang lemah antara variabelnya, sementara nilai yang mendekati -1 atau $+1$ menunjukkan hubungan linier yang kuat antara dua variabel (Kirch 2008).

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Analisis data terkait kebijakan MBG menggunakan proksi variabel *dummy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan MBG berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan petani. Penerapan kebijakan MBG memiliki kecenderungan meningkatkan nilai tukar petani sebesar 1,8492 point dibanding sebelum ada kebijakan MBG. Nilai rata-rata NTP petani dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2024 berkisar 120,6142 dan data NTP petani pada bulan Januari sampai Juni 2025 mencapai 122,4633. Data analisis detail dapat dilihat pada tabel berikut:

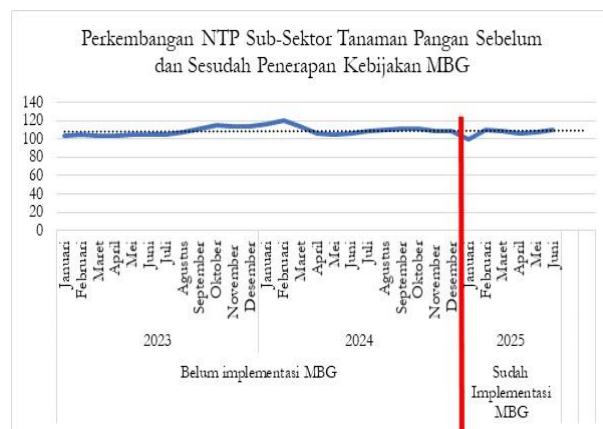
Tabel 2. Hasil analisis korelasi Spearman

		NTP
Spearman's rho	MBG	Correlation Coefficient .587**
		Sig. (2-tailed) .001
		N 30
NTP		Correlation Coefficient 1.000
		Sig. (2-tailed)
		N 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data sekunder diolah (2025)

Hasil analisis korelasi Spearman menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara implementasi kebijakan MBG dan kesejahteraan petani, yang diproksikan dengan nilai tukar petani. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan MBG cenderung diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani. Analisis terhadap nilai tukar petani per sub-sektor pertanian menunjukkan trend yang berbeda. Pada sub-sektor tanaman pangan, Nilai tukar petani trend cenderung naik, sesudah implementasi kebijakan MBG bila dibandingkan saat sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Data rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4. Analisis trend NTP sub-sektor tanaman pangan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan MBG.

Sumber: Data BPS diolah (2025)

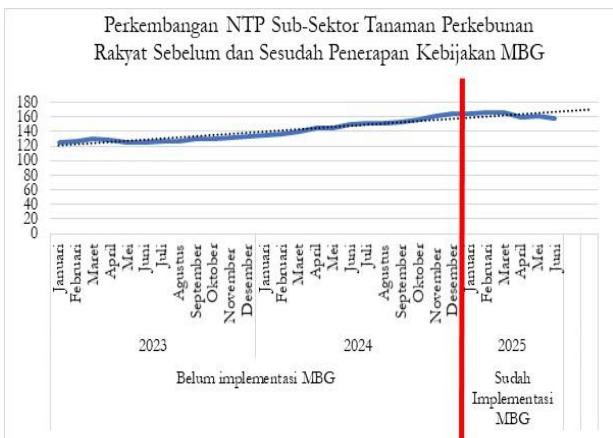
Analisis terhadap kesejahteraan petani sub-sektor tanaman hortikultura menunjukkan trend yang meningkat.



Gambar 5. Analisis trend NTP sub-sektor tanaman hortikultura sebelum dan sesudah implementasi kebijakan MBG.

Sumber: Data BPS diolah (2025)

Trend peningkatan kesejahteraan petani sub-sektor hortikultura pasca pemberlakuan kebijakan MBG menunjukkan adanya peningkatan harga yang diterima petani dibandingkan harga yang dibayarkan. Pada petani sub-sektor tanaman perkebunan rakyat juga menunjukkan trend yang meningkat. Salah satu kontribusi hasil perkebunan rakyat adalah penyediaan minyak goreng sebagai bahan pengolahan makanan. Analisis trend perkembangan NTP sub-sektor perkebunan rakyat sebelum dan sesudah penerapan kebijakan MBG ini ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Analisis trend NTP sub-sektor tanaman perkebunan rakyat sebelum dan sesudah implementasi kebijakan MBG.

Sumber: Data BPS diolah (2025)

Nilai tukar petani pada sub-sektor peternakan menunjukkan trend yang konstan baik pada kondisi sebelum penerapan dan sesudah penerapan kebijakan MBG. Hal tersebut dijelaskan pada Gambar 7.



Gambar 7. Analisis trend NTP sub-sektor peternakan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan MBG.

Sumber: Data BPS diolah (2025)



Gambar 8. Analisis trend NTP sub-sektor perikanan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan MBG.

Sumber: Data BPS diolah (2025)

Pada sub-sektor perikanan, NTP menunjukkan trend yang justru menurun. Analisis dapat dilihat pada Gambar 8.

Berdasarkan analisis trend per sub-sektor menunjukkan hanya NTP sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang memiliki trend meningkat. Pada sub-sektor peternakan trendnya konstan dan sub-sektor perikanan menunjukkan trend yang menurun. Kebijakan makan bergizi tentunya harus didukung oleh penyediaan protein hewani yang sehat dan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan peran peternak dan nelayan pada kebijakan program MBG masih perlu ditingkatkan.

Analisis trend tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan MBG melibatkan peran petani lokal dalam rantai pasok (Hendrawan 2025). Keterlibatan petani, peternak, nelayan dan usaha mikro kecil dalam kebijakan ini masih fokus pada pelibatan koperasi yang menaungi kelompok tani/nelayan/peternak. Petani Indonesia memiliki karakteristik berusahatani secara individual. Untuk membentuk kelompok dan koperasi membutuhkan waktu yang panjang. Kekakuan peraturan ini berpotensi menjadi penghambat dalam meningkatkan petani/nelayan/peternak skala kecil pada program MBG. Faktor kakunya rantai pasok dan kurangnya keterlibatan masyarakat, menjadi salah satu faktor penghambat kebijakan program MBG (Herdiana 2025). Para penerima manfaat kebijakan swasembada pangan tidak selalu dapat menjamin ketahanan pangan. Hal ini terjadi karena penerima manfaat kebijakan ini adalah kelompok petani besar, pemilik tanah yang kapitalis dan pedagang perantara. Konsumen pembayar pajak dan petani kecil menjadi korban yang akan semakin rentan akibat kebijakan tersebut. Dampak kebijakan ini justru menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat kepada kelompok rakyat kecil (Sasmi *et al.* 2022).

Policy brief terkait kebijakan penyediaan makanan gratis di sekolah di negara-negara Uni-Eropa adalah sebagai tanggung jawab atas pelaksanaan hak asasi manusia atas pangan dan gizi sehingga menerapkan kebijakan penyediaan makanan di sekolah yang gratis, sehat, dan berkelanjutan untuk setiap anak. Kebijakan ini diikuti oleh kebijakan pembelian makanan sekolah dari petani skala kecil dan menengah. kondisi tersebut dapat menjadi alat untuk keadilan sosial karena memberikan sumber penghasilan yang

stabil bagi petani serta mendorong transisi ke sistem pangan berkelanjutan. Petani skala kecil saat ini menghadapi banyak hambatan saat mengajukan penawaran untuk tender publik, termasuk: prosedur tender yang rumit dan memberatkan, penekanan berlebihan pada harga sebagai kriteria penawaran, persyaratan partisipasi yang memberatkan, kapasitas pasokan, kurangnya informasi tentang peluang tender, dan periode pembayaran yang lama. Keadaan tersebut membuat petani skala kecil enggan untuk mengajukan penawaran dan terlibat dalam kebijakan penyediaan makanan gratis di sekolah di negara-negara Uni-Eropa. Upaya mengatasi masalah keengganan petani skala kecil untuk terlibat dalam program tersebut, maka direkomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. Melakukan keterlibatan pasar dan dialog multipihak untuk meningkatkan transparansi, keterampilan, pembangunan kapasitas, dan aksesibilitas bagi petani skala kecil;
2. Mendukung proses pengadaan yang dinamis dan keterlibatan pra-pengadaan untuk melibatkan petani skala kecil dan menilai kebutuhan mereka (pelatihan, logistik, dll.);
3. Menetapkan kriteria minimum wajib untuk kantin publik berdasarkan ukuran lahan pertanian, seperti mewajibkan setidaknya 10% bahan pangan dipasok dari petani skala kecil; otoritas yang mengatur pengadaan harus secara jelas memasukkan produsen skala kecil dalam kontrak pengadaan, untuk menghindari kecenderungan pengadaan dari pertanian berskala industri;
4. Mendukung sekolah dalam mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, dapur dan peralatan terkait, serta tempat bagi anak-anak untuk makan, dan mendanai proyek percontohan untuk mengujinya;
5. Memberikan pelatihan kepada pekerja dan juru masak di kantin sekolah tentang cara mengelola dan memasak produk segar dan diproses dari rantai pasokan pendek;
6. Mendukung perintis pertanian baru dan memperkuat regenerasi generasi di wilayah tersebut dengan melindungi lahan pertanian dan memastikan akses yang adil terhadap lahan bagi petani muda dan perempuan, termasuk melalui penggunaan subsidi kebijakan pertanian bersama.
7. Memperkuat koordinasi yang baik untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang baik dan

mendorong perusahaan katering kecil untuk membeli lebih banyak dari petani kecil.

Seluruh rekomendasi tersebut dapat diterapkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Richardot *et al.* 2023). Sari *et al.* (2015) yang meneliti berbagai kebijakan nasional yang menerapkan program makan siang di sekolah berskala besar yang diimplementasikan di 126 negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa keberhasilan program makan bergizi di tingkat nasional dapat berhasil berkat perpaduan antara kebijakan keamanan pangan dan kebijakan pertanian. Pada dasarnya dalam pengembangan kesejahteraan petani di Indonesia memerlukan peran serta pemerintah terutama kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan pelestarian alam (Kaswanto *et al.* 2021; Adrian *et al.* 2024). Upaya jangka panjang dalam menjaga kedaulatan pangan (studi pada IKN) adalah memproduksi pangan domestik. Penyediaan pangan secara lokal akan membuat peningkatan produktivitas pertanian secara berkesinambungan (Sunardi *et al.* 2020; Faisal *et al.* 2022; Mulyono *et al.* 2025) Dalam mencapai kesejahteraan petani, upaya pemetaan dan menginventaris kebutuhan petani berdasarkan wilayah dan komoditas menjadi dasar kebijakan yang diambil pemerintah menjadi tepat sasaran (Widyastutik *et al.* 2025).

Penelitian Suardi dan Purmadani tahun 2025 menganalisis efek kebijakan MBG secara studi literatur, menunjukkan adanya efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung terjadi pada peningkatan peningkatan peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah. Penelitian Suardi dan Purmadani tahun 2025 menganalisis efek kebijakan MBG dengan metode studi literatur terkait efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung terjadi pada: 1) peningkatan peningkatan peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah, 2) penciptaan lapangan kerja yang dimulai dari desa ke kota, 3) terjadi perputaran roda ekonomi lokal yang membuat perekonomian daerah semakin meningkat. Efek tidak langsung tampak pada: 1) peningkatan produktivitas SDM Indonesia, 2) penurunan angka *stunting* yang mengganggu tumbuh kembang anak-anak Indonesia, 3) terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga yang membutuhkan dan 4) berdampak pada tingkat pertumbuhan PDB (Suardi dan Purmadani 2025).

Faktor pendorong keberhasilan program MBG adalah keberadaan sumber daya manusia Indonesia. Program ini membutuhkan sumber daya petani yang handal sebagai pemasok kebutuhan pangan dan nutrisi. keberhasilan kebijakan ini dalam jangka pendek tergantung pada integrasi dengan sistem pangan lokal. Kebijakan ini harus fokus pada pelibatan komunitas petani/nelayan/peternak skala kecil di setiap daerah sehingga mengurangi ketergantungan berlebihan pada anggaran negara (Arifin *et al.* 2021; Septian *et al.* 2025; Yusriadi 2025). Sehingga keterlibatan petani, nelayan, peternak, usaha mikro dan kecil di setiap wilayah akan membuat pangan menjadi semakin terakses dengan biaya rendah. Hal tersebut dapat menjadi pengungkit kesejahteraan nelayan, peternak, usaha mikro dan kecil. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan secara berkala terkait upaya peningkatan keterlibatan petani dalam rantai pasok kebijakan program MBG sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pertanian Indonesia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Widiatmaka, Munibah K, Firmansyah, I. 2024. Desain Regulasi Spasial Lanskap Lahan Pertanian untuk Kemandirian Pangan Kabupaten Majalengka Hingga Tahun 2045. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 11(2): 113-123.
- Arifin HS, Nurhayati HSA, Kaswanto RL, Budiadi, Irwan SNR, Faisal B, Dahlani MZ, Nadhiroh SR, Wahyuni TS, Ali MS. 2021. Landscape Management Strategy of Pekarangan to Increase Community Immunity during the Covid-19 Pandemic in Java Indonesia—Inductive Research. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 918(1):012029. IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/918/1/012029>
- Bethmann D, Cho JI. 2022. The Impacts of Free School Lunch Policies on Adolescent BMI and Mental Health: Evidence from a Natural Experiment in South Korea. *SSM - Population Health* 18. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101072>
- Bundy DA, Gentilini U, Schultz L, Bedasso B, Singh S, Okamura Y, TMM Iyengar H, Monique Blakstad M. 2024. *School Meals, Social Protection and Human Development: Revisiting Trends, Evidence, and Practices in South Asia and Beyond*. www.worldbank.org
- Faisal B, Dahlani MZ, Arifin HS, Nurhayati, Kaswanto RL, Nadhiroh SR, Wahyuni TS, Irawan SNR. 2022. Landscape Character Assessment of Pekarangan towards Healthy and Productive Urban Village in Bandung City, Indonesia. *International Conference on Sustainable Environment, Agriculture and Tourism (ICOSEAT 2022)*: 778-784. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-086-2_102
- Hendrawan DS. 2025. *Model Bisnis dan Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis*.
- Herdiana D. 2025. Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(2): 470–478. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063556>
- INDEF. 2024. *Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis*.
- Kaswanto RL, Aurora RM, Yusri D, Sjaf S, Barus S. 2021. Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Unggulan Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Analisis Kebijakan Pertanian* 19(2): 189-205. <https://doi.org/10.21082/akp.v19n2.2021.189-205>
- Kirch W. 2008. *Encyclopedia of Public Health* pp. 1073-1221. Springer.
- Ludher E, Nasution M. 2024. Indonesia's Free Nutritious Meal (Makan Bergizi Gratis) Programme Offers Policy Opportunities for Climate Action. *ISEAS Perspective* 96(13).
- Mulyono J, Yofa RD, Septanti KS, Setyaningrum, WF, Irawan AR. 2025. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 12(1): 48–58.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173, 1. 2024.
- Richardot A, Diaz EK, Maisano T. 2023. *Free School Meals Sourced from Small-Scale Farmers: a Win-Win Approach for Food Systems Transformation* (1010000918).
- Sari NPWP, Mazenda A, Katiyatiya CLF., Nguyen MH, Vuong QH. 2025. Policy Analysis in School Meals Program: Regulation Impacts

- on in-School Food Fortification. *Journal of Hunger and Environmental Nutrition*. <https://doi.org/10.1080/19320248.2025.2505041>
- Sasmi M, Susanto H, Mula EPK, Alatas A. 2022. Farmer Characteristics' Effect on the Decision of Farmers in Choosing Local Variety Rice Farming Business. *Business Review and Case Studies* 3: 104–112. <https://doi.org/10.17358/brcs.3.2.104>
- Schwartz AE, Rothbart MW. 2019. *Let Them Eat Lunch: the Impact of Universal Free Meals on Student Performance*. Paper No.203; Working Paper Series July 2019.
- Septian DE, Kaswanto RL, Arifin HS. 2025. Kontribusi Jasa Lanskap Agroforestri Sebagai Usaha Peningkatan Resiliensi Ekosistem terhadap Tekanan Lingkungan. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 12(1): 85-94. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i1.62705>
- Suardi, Purmadani AS. 2025. Makan Bergizi Gratis Dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Bisnis Net* 8(1): 323-327.
- Sunardi, Kaswanto RL, Sjaf S. 2020. Relationship between Plant Biodiversity and Carbon Stock in Rural Area of Cisadane Watershed. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18(3): 610-616. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.610-616>
- UNICEF. 2025. Lembaran Fakta Pusat Unggulan Nasional Program Makan Bergizi Gratis: Menguatkan Basis Bukti untuk Mendorong Agenda Gizi.
- Wicaksana M, Wigati T. 2024. Makan Bergizi Gratis (MBG). *Lentera APBN: Direktorat Penyusunan APBN* 32: 1-7.
- Widyastutik, Hotsawadi, Setyawati D, Amaliah S, Hermawan I. 2025. Persepsi Pelaku Usaha Tani terhadap Kebijakan dan Program Investasi Publik di Sektor Pertanian. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 12(1): 1–10.
- Yusriadi Y. 2025. The Impact of Free Nutritious Meal Programs on Food Security: A Systematic Review. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research Copyright*: 5(1): 92–97.
- Zuercher MD, Orta-Aleman D, Cohen JFW, Hecht CA, Hecht K, Polacsek M, Patel AI, Ritchie LD, Gosliner W. 2024. The Benefits and Challenges of Providing School Meals during the First Year of California's Universal School Meal Policy as Reported by School Foodservice Professionals. *Nutrients* 16(12). <https://doi.org/10.3390/nu16121812>